

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPF,UGM
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta. Erlangga.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Makagansa, H.R. *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta : FusPad, 2008.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mohammad Mahsun. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF.
- Nurhidayat. (2005). *Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU RI No. 33 Tahun 2004*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Hermi Oppier. (2013). “Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara”. *Jurnal Benchmark* Volume 2 November 2013.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pratikno. "Usulan Perubahan Kebijakan Penataan Daerah : Pemekaran dan Penggabungan Daerah". Paper USAID, 29 February 2008

Ratna Sholikhah. (2011). "*Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009*". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 1999. Jakarta.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU No. 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<http://djpk-depkeu.go.id>.

<http://infosijunjung.blogspot.com/2016/07/sejarah-berdirinya-kabupaten-sijunjung.html#ixzz4jxPouIg0>